

***E-readiness* Aktor Pelaksana PACEMACE Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura**

Grace Salindeho^a

^aUniversitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur

e-mail : ^asalindehograce336@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan *e-readiness* pada layanan digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Penilaian dilakukan dengan menggunakan enam domain utama, yaitu Strategy, Technology, Organization, People, Environment, dan Budget. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan *e-readiness* secara keseluruhan berada pada kategori “Siap” (Skala 3, 62–86%), dengan capaian sebesar 79,7% melalui perhitungan rata-rata sederhana, serta 73,84% apabila menggunakan bobot relatif antar domain. Domain Strategy, Organization, People, dan Environment memperoleh skor tertinggi (78%), menandakan adanya arah strategis, dukungan organisasi, kesiapan SDM, dan lingkungan yang kondusif. Sementara itu, domain Technology (76%) dan Budget (72%) memiliki nilai lebih rendah, menunjukkan masih adanya keterbatasan infrastruktur, keamanan data, serta alokasi anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dukcapil Kota Jayapura telah siap melaksanakan layanan digital, namun perlu penguatan pada aspek teknologi dan pendanaan agar mampu mencapai kategori “Sangat Siap”.

Kata Kunci: *E-readiness*, Layanan Digital, Dukcapil, Kota Jayapura, Transformasi Digital.

E-readiness of PACEMACE Implementing Actors at the Department of Population and Civil Registration of Jayapura City

Abstract

This study aims to analyze the level of e-readiness in digital services at the Department of Population and Civil Registration of Jayapura City. The background of this research is based on the importance of digital transformation in improving the quality of public services that are fast, transparent, and accountable. The assessment was conducted using six main domains: Strategy, Technology, Organization, People, Environment, and Budget. The results show that the overall e-readiness level falls into the “Ready” category (Scale 3, 62–86%), with an achievement of 79.7% using a simple average calculation, and 73.84% when applying relative weighting across domains. The domains of Strategy, Organization, People, and Environment obtained the highest score (78%), indicating clear strategic direction, organizational support, human resource readiness, and a supportive environment. Meanwhile, the Technology (76%) and Budget (72%) domains scored lower, highlighting limitations in infrastructure, data security, and budget allocation. This study concludes that the Jayapura City Dukcapil is ready to implement digital services, but strengthening technology and funding aspects is necessary to reach the “Very Ready” category.

Keywords: *E-readiness, Digital Services, Dukcapil, Jayapura City, Digital Transformation.*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan tuntutan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan *e-government* menjadi salah satu strategi utama yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan (Kennedy, Surya, and Wartoyo 2024; Nurhidayat, Nurmandi, and Misran 2024). Namun, keberhasilan implementasi *e-government* tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga kesiapan institusi. Oleh karena itu, konsep *electronic readiness (e-readiness)* digunakan sebagai instrumen pengukuran sejauh mana instansi siap mengadopsi TIK dalam penyelenggaraan layanan publik (Riani, Putri, and Pratama 2021).

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa meski Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi payung kebijakan, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala (KEMENPANRB 2024). Kota Jayapura misalnya, baru mencapai indeks SPBE 2,35 pada tahun 2024 dengan kategori “cukup”, sehingga belum memenuhi target nasional (BAPPEDA 2025). Salah satu terobosan digital yang dikembangkan adalah PACEMACE (Pelayanan Cepat Masyarakat Cerdas) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL). Layanan ini memungkinkan masyarakat mengakses administrasi kependudukan secara daring, mulai dari KTP, KK, akta kelahiran, hingga pindah domisili.

Meskipun inovasi ini menjadi langkah maju, berbagai keluhan masyarakat terkait antrean

panjang, keterbatasan literasi digital, hingga lemahnya infrastruktur menandakan adanya masalah dalam kesiapan pelaksana layanan (Rustan Saru, 2023; Awie Gemoy, 2023). Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana *e-readiness* DISPENDUKCAPIL Kota Jayapura dalam mengelola PACEMACE.

Konsep *e-government* dipahami sebagai pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks pelayanan publik, keberhasilan *e-government* tidak hanya diukur dari ketersediaan sistem digital, tetapi juga sejauh mana layanan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara sederhana, adil, dan mudah diakses (Rachman 2021).

Isu kesiapan digital, implementasi *e-Government*, dan inovasi pelayanan publik telah menjadi fokus utama dalam berbagai literatur. Studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, teknologi, serta, yang paling krusial, kesiapan aktor pelaksana dan pengguna. Penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Maulana & Priatna (2021) tentang perancangan sistem administrasi kependudukan digitalisasi desa, serta penelitian mengenai penerapan *e-Government* melalui aplikasi di tingkat desa oleh Abubakar & Prasetya (2025), menegaskan pentingnya sistem informasi yang terintegrasi dan kemudahan akses di tingkat akar rumput. Lebih jauh, keberlanjutan dan suksesnya inovasi layanan publik tidak hanya dilihat dari sisi perancangan, namun juga dari aspek adopsi teknologi oleh pegawai, seperti yang diteliti oleh Mugiarto dkk. (2023) mengenai adopsi teknologi aplikasi aset dan kompetensi pegawai. Aspek adopsi ini seringkali menjadi

hambatan dalam akselerasi program digital, seperti yang tercermin dalam penelitian Ummah dkk. (2024) mengenai hambatan akselerasi penerbitan sertifikat.

Relevansi penelitian ini terletak pada upaya mensintesis berbagai aspek *e-readiness* dari perspektif aktor pelaksana di layanan spesifik Disdukcapil Kota Jayapura, mengingat konteks administrasi kependudukan yang sangat vital. Secara umum, layanan berbasis digital menghadapi tantangan dari dua sisi: internal (aktor pelaksana) dan eksternal (pengguna). Dari sisi eksternal, studi Abubakar & Nurhaliza (2023) dan Pramuditha & Agustina (2022) menekankan pentingnya partisipasi, persepsi, dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna akhir layanan digital. Sementara itu, faktor penentu tingkat penerimaan pasien atas sistem antrian online pada Puskesmas yang diteliti oleh Amelinda dkk. (2025) juga memberikan landasan komparatif dalam memahami faktor-faktor psikologis dan teknis yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap sistem digital. Meskipun fokus PACEMACE adalah pada layanan kependudukan, tantangan yang dihadapi dalam keberlanjutan inovasi layanan publik di kota lain, seperti Bandung (Sufianti dkk., 2021) dan Cimahi, serta analisis keberlanjutan inovasi lokal di bidang kesehatan (Ramdani, 2019), menyediakan kerangka teoritis untuk menguji faktor-faktor kunci yang menentukan keberlanjutan layanan digital, termasuk model kelembagaan inovasi (Mursalim & Anwar, 2024). Dengan demikian, penelitian ini secara khusus akan mengukur kesiapan aktor internal Disdukcapil Kota Jayapura (sebagai pelaksana PACEMACE) berdasarkan pengalaman dan tantangan yang diidentifikasi oleh literatur terdahulu, memastikan bahwa implementasi sistem

digital PACEMACE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sementara itu, *e-readiness* digunakan sebagai indikator kesiapan organisasi atau negara dalam memanfaatkan TIK. Dada (2006) menjelaskan bahwa *e-readiness* sering digunakan untuk menilai kesiapan partisipasi dalam aktivitas digital, sedangkan Chanyagorn and Bundid Kungwannarongkun (2011) menekankan aspek evaluasi terhadap konsumen, bisnis, dan pemerintah. Model pengukuran yang banyak digunakan adalah *STOPE framework* (*Strategy, Technology, Organization, People, Environment*), yang dikembangkan oleh Al-Osaimi, Alheraish, and Bakry (2006) Kerangka ini menilai kesiapan dari lima domain, mulai dari strategi kebijakan hingga faktor lingkungan eksternal. Nugroho (2020) menegaskan bahwa *STOPE* lebih relevan karena bersifat komprehensif, mampu mengintegrasikan faktor internal dan eksternal dalam satu kerangka terpadu.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan beragam temuan Mengesha et al. (2022) menilai kesiapan *Ethio-Telecom* dengan *STOPE*, hasilnya empat domain masuk kategori “siap dengan perbaikan kecil”, sedangkan dimensi *people* belum siap. Yuliantini and Pribadi (2024) meneliti kesiapan masyarakat terhadap aplikasi *Jogja Smart Service* dan menemukan bahwa infrastruktur TIK memiliki pengaruh signifikan, sementara aspek kepercayaan tidak. Di Jayapura sendiri, penelitian Tebay, Windasari, and Septiana (2023) menilai kegunaan website *PACEDUKCAPIL*, tetapi belum membahas kesiapan instansi secara menyeluruh. Perbedaan inilah yang menjadi kebaruan penelitian ini: fokus pada kesiapan institusi dalam mengadopsi PACEMACE

dengan *framework* STOPE.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan tingkat kesiapan DISPENDUKAPIL Kota Jayapura dalam penerapan layanan digital PACEMACE. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memotret fenomena empiris tanpa menguji hipotesis (Sugiyono 2023)

Variabel tunggal penelitian adalah *e-readiness*, yang dioperasionalisasikan berdasarkan *framework* STOPE Al-Osaimi et al. (2006) dengan modifikasi berupa penambahan domain Budget Nugroho (2020). Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert lima poin, mencakup indikator pada domain *Strategy*, *Technology*, *Organization*, *People*, *Environment*, serta *Budget*.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai DISPENDUKAPIL Kota Jayapura yang terlibat dalam pengelolaan PACEMACE. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, mengingat jumlah populasi relatif kecil dan masih memungkinkan untuk dijangkau seluruhnya. Data yang terkumpul kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan alat bantu statistik. Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, berupa perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan kategorisasi tingkat kesiapan berdasarkan pemeringkatan CID Harvard (2019), yaitu: belum siap, cukup siap, siap, dan sangat siap.

C. PEMBAHASAN

1. Domain Strategy (3,9 / 78%)

Domain strategi berada pada kategori Siap. Skor ini menunjukkan bahwa Dukcapil Kota Jayapura telah memiliki arah dan perencanaan strategis yang cukup jelas dalam mendukung layanan digital. Adanya roadmap TIK serta

komitmen pimpinan dalam mendorong pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci. Namun demikian, strategi masih perlu dikaji secara periodik agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan regulasi pemerintah pusat.

Tabel 1. Hasil Olah Data Kuesioner

Domain	Bobot
Strategy	3,9
Technology	3,8
Organization	3,9
People	3,9
Environment	3,9
Budget	3,6

Sumber: Data Diolah (2025).

2. Domain Technology (3,8 / 76%)

Domain teknologi berada pada kategori Siap, namun menjadi salah satu aspek yang relatif lebih rendah dibanding domain lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur teknologi informasi sudah tersedia dan dapat menunjang layanan digital, tetapi masih terdapat keterbatasan pada integrasi sistem, keamanan data, serta kecepatan pemutakhiran perangkat. Peningkatan investasi pada infrastruktur digital akan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan layanan berbasis teknologi.

3. Domain Organization (3,9 / 78%)

Skor organisasi menunjukkan kategori Siap. Dukcapil Kota Jayapura telah memiliki struktur organisasi yang mendukung implementasi layanan digital, termasuk pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Keterlibatan aparatur dalam mendukung digitalisasi menunjukkan kesiapan organisasi secara internal. Meski demikian, masih diperlukan penguatan tata kelola dan manajemen perubahan agar seluruh unit kerja dapat beradaptasi lebih cepat terhadap

transformasi digital.

4. Domain People (3,9 / 78%)

Domain SDM berada pada kategori Siap. Skor ini mengindikasikan bahwa aparatur memiliki kompetensi dasar dan kemauan untuk mendukung layanan berbasis digital. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada kebutuhan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya terkait literasi digital, keamanan siber, dan adaptasi terhadap aplikasi layanan terbaru. Dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM akan menjadi penentu keberhasilan transformasi digital jangka panjang.

5. Domain Environment (3,9 / 78%)

Domain lingkungan juga berada pada kategori Siap. Faktor eksternal seperti dukungan pemerintah daerah, regulasi, serta kebutuhan masyarakat akan layanan digital menjadi dorongan positif. Namun, kondisi geografis Kota Jayapura dan keterbatasan akses internet di beberapa wilayah masih menjadi kendala dalam pemerataan layanan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi menjadi penting untuk memperkuat dukungan lingkungan.

6. Domain Budget (3,6 / 72%)

Domain anggaran mendapatkan skor terendah dibandingkan domain lainnya, meskipun masih dalam kategori Siap. Hal ini menandakan bahwa alokasi dana untuk mendukung layanan digital masih terbatas. Keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pemeliharaan sistem, pembaruan teknologi, maupun pelatihan SDM. Oleh karena itu, strategi optimalisasi anggaran dan peluang kerja sama dengan pihak ketiga perlu menjadi perhatian agar keberlanjutan layanan digital dapat terjamin.

Berdasarkan hasil pengolahan data, tingkat

kesiapan *e-readiness* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura secara keseluruhan berada pada angka 79,7% apabila dihitung menggunakan rata-rata sederhana dari enam domain utama, atau 73,84% apabila menggunakan pendekatan bobot relatif antar domain. Kedua hasil perhitungan tersebut menempatkan *e-readiness* Dukcapil Kota Jayapura pada kategori Skala 3 – “Siap” (62–86%). Temuan ini menunjukkan bahwa instansi telah memiliki kesiapan yang cukup baik dalam mengimplementasikan layanan digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek teknologi dan anggaran, agar ke depan dapat mencapai kategori “Sangat Siap” serta mampu memberikan layanan digital yang lebih optimal dan berkelanjutan kepada masyarakat.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan *e-readiness* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura berada pada kategori “Siap” (Skala 3, 62–86%), dengan capaian 79,7% berdasarkan rata-rata sederhana dan 73,84% dengan bobot relatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa instansi telah memiliki kesiapan yang baik dalam melaksanakan layanan digital, sejalan dengan tujuan penelitian pada pendahuluan untuk menilai kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Kekuatan utama terletak pada domain Strategy, Organization, People, dan Environment (78%) yang menunjukkan arah strategis jelas, dukungan organisasi, kesiapan SDM, serta lingkungan kondusif. Namun, domain Technology (76%) dan terutama Budget (72%) menjadi tantangan karena

keterbatasan infrastruktur, keamanan sistem, dan alokasi dana. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa modernisasi infrastruktur TIK, peningkatan alokasi anggaran, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur. Evaluasi roadmap digital dan penguatan dukungan lingkungan juga penting untuk menjamin keberlanjutan layanan. Dengan implementasi rekomendasi ini, Dukcapil Kota Jayapura diharapkan dapat meningkat ke kategori “Sangat Siap” serta memberikan layanan publik digital yang lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abubakar, R. R. T., Prasetya, D.D. (2025). Penerapan E-Government melalui Aplikasi Masagi Musrenbang di Desa Ciburial. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 28 (1), 25 – 42.
- Abubakar, R. R. T. , Nurhaliza, G.A.(2023). Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kota Cimahi. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5 (2), 82 – 92.
- Amelinda, S., Aditya Pradesa, H., Syahadat Harahap, A., & Wijayanti, R. (2025). Faktor Penentu Dari Tingkat Penerimaan Pasien Atas Sistem Antrian Online Pada Puskesmas Rancaekek DTP. *JMBI : Jurnal Manajemen Bisnis Dan Informatika*, 5(2), 134-146. <https://doi.org/10.31967/prodimanajemen.v5i2.1387>
- BAPPEDA. 2025. “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura.”
- Chanyagorn, Pornchai, and Bundid Kungwannarongkun. 2011. “ICT Readiness Assessment Model for Public and Private Organizations in Developing Country.” *International Journal of Information and Education Technology* 1.
- CID Harvard. 2019. *Readiness for Networked World A Guide for Developing Countries*. <http://unpan1.un.org/intradoc/group/s/public/documents/APCITY/UNPAN004060.pdf>.
- KEMENPANRB. 2024. *Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024*. Jakarta.
- Kennedy, Alexander, William Hartato Surya, and Franciscus Xaverius Wartoyo. 2024. “Tantangan Dan Solusi Penerapan E-Government Di Indonesia.” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 4(2).
- Maulana, R.R., Priatna, R. (2021). Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 419 – 423. <http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3753>
- Mengesha, Getachew H., Philip F. Musa, Solomon Negash, Ruth Leuleged, and George Munchus. 2022. “Assessment of Readiness for Launching Cloud Computing Services: The Case of <sc>Ethio-Telecom</Sc> in Ethiopia.” *THE ELECTRONIC JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS IN DEVELOPING COUNTRIES* 88(4). doi:10.1002/isd2.12210.
- Mugiarto, M., Agustina, I., & Suryaman, W. (2023). Adopsi Teknologi Aplikasi Aset Dan Kompetensi Pegawai Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Pengelolaan Barang Milik Negara Di S opd Kota Cimahi . *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4823-4835. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2800>
- Mursalim, S. W., & Anwar, S. (2024). Institutional model of science techno Park: Overview of government-owned Stp management in West Java. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 43. doi:10.26858/jiap.v14i1.57033
- Nugroho, Rossi Adi. 2020. “KAJIAN ANALISIS

- MODEL E-READINESS DALAM RANGKA IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT.” *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 11(1):65. doi:10.17933/mti.v11i1.171.
- Nurhidayat, Nurhidayat, Achmad Nurmandi, and Misran Misran. 2024. “Evaluation of the Challenges of E-Government Implementation: Analysis of the E-Government Development Index in Indonesia.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 8(2):371–83. doi:10.24198/jmpp.v8i2.52759.
- Osaimi, Khalid, Abdulmohsen Alheraish, and Saad Haj Bakry. 2006. “An Integrated STOPE Framework for E-Readiness.” (1):75. doi:10.1002/nem.657.
- Pramuditha, R., & Agustina, I. (2022). Persepsi Masyarakat Pengguna Atas Kualitas Pelayanan E-KTP Pada Kecamatan Bogor Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1), 884-901. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1922>
- Rachman, Marjoni. 2021. *Manajemen Pelayanan Publik*. 1st ed. Samarinda: TAHTA MEDIA GROUP.
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>.
- Riani, Dinda, Gusti Agung Ayu Putri, and I. Putu Agus Eka Pratama. 2021. “E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gianyar).” *JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer* 2(3). doi:10.24843/jtrti.2021.v02.i03.p09.
- Sufianti, E., Jubaedah, E., Abdullah, S. (2021). Building Sustainability of Public Service Innovation in Bandung City, West Java, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, pp. 19 – 24. 10.2991/assehr.k.210629.005
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 5th ed. Yogyakarta: ALFABETA.
- Tebay, Fransiska, Ike Pertiwi Windasari, and Risma Septiana. 2023. “ANALISIS USABILITY WEBSITE APLIKASI PACEDUKCAPIL KOTA JAYAPURA MENGGUNAKAN METODE WEBUSE.” *Jurnal Teknik Komputer* 2:11–15.
- Ummah, A.J., Nurliawati, N., Sudrajat, A.S., Novira, A. (2024). hambatan proses akselerasi penerbitan sertifikat rechts cadaster:program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten bandung *Creative Research Journal*, 10(01), 27-40. <https://doi.org/10.34147/crj.v10i1.340>
- Yuliantini, Lisa Sophia, and Ulung Pribadi. 2024. “Citizens Readiness for E-Government on The Jogja Smart Service (JSS) Application in Yogyakarta City.” *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)* 13(2):234–47. doi:10.23887/janapati.v13i2.67697